

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan seseorang dapat kita ukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan suatu terobosan baru dalam menilai pembangunan manusia, dengan adanya indeks pembangunan manusia yang mencakup tiga komponen penting seperti indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang mampu memberikan gambaran dalam pembangunan manusia, yang mana jika ketiga komponen tersebut sudah dipenuhi oleh masyarakat maka masyarakat bisa digolongkan sebagai masyarakat yang sejahtera. Pembangunan manusia didefinisikan oleh UNDP (1990) sebagai proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dimana penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan sedangkan upaya-upaya dalam pembangunan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain infrastruktur negara, modal, dan sumber – sumber daya alam, negara juga harus mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dalam pembangunan. Pembangunan manusia memiliki tujuan untuk kemajuan suatu negara, dimana kualitas SDM yang baik akan membantu negara memaksimalkan segala sumber daya yang ada agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan.

Tidak adanya pembangunan manusia membuat suatu negara tidak akan dapat mengembangkan apapun (Todaro, 2000). Pembangunan manusia harus dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka

pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Pemerintah hendaknya memperhatikan hal tersebut terlebih jika memandang manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia akan menunjang pembangunan di berbagai sektor. Hal ini akan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut.

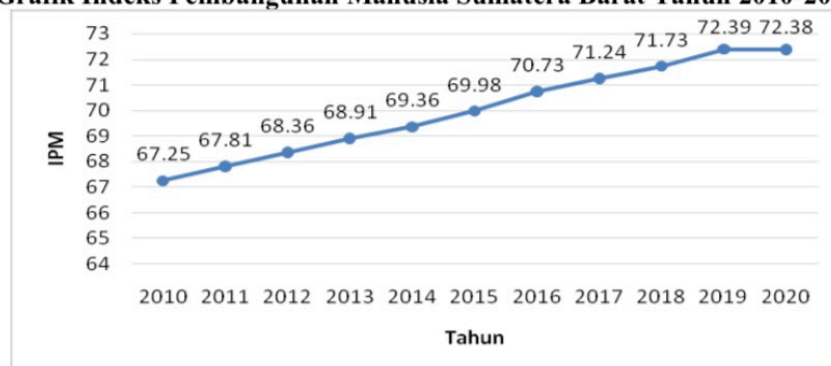
Pembangunan manusia merupakan hal yang penting terutama bagi negara khususnya negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena banyak negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun masih gagal dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan yang tinggi. Selain itu pembangunan manusia sebenarnya merupakan investasi tidak langsung terhadap pencapaian tujuan perekonomian nasional. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, terutama di negara – negara yang paling miskin, kualitas hidup dinilai dari pendapatan yang lebih tinggi, namun pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi.

Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya (Usmaliadanti, 2011). Pembangunan manusia dapat dilihat dari IPM yang didalamnya terdapat faktor pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini memiliki fungsi penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Sektor pendidikan berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, skill, serta membentuk kepribadian, dilengkapi dengan sektor kesehatan

yang berperan menciptakan hidup sehat, umur panjang dan meningkatkan produktivitas manusia Untuk mencapai IPM yang maksimal diperlukan peranan pemerintah dalam menciptakan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Mankiw (2008) berpendapat, pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Tinggi rendahnya capaian IPM suatu negara tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dalam kebijakan fiskal. Tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan, kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah merupakan pengertian kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Wolfson dalam Suparmoko (Lilik, 2008). Begitu juga dengan capaian IPM di Sumatera Barat yg di sajikan dengan grafik di bawah ini :

Gambar 1.1
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat Tahun 2010-2020



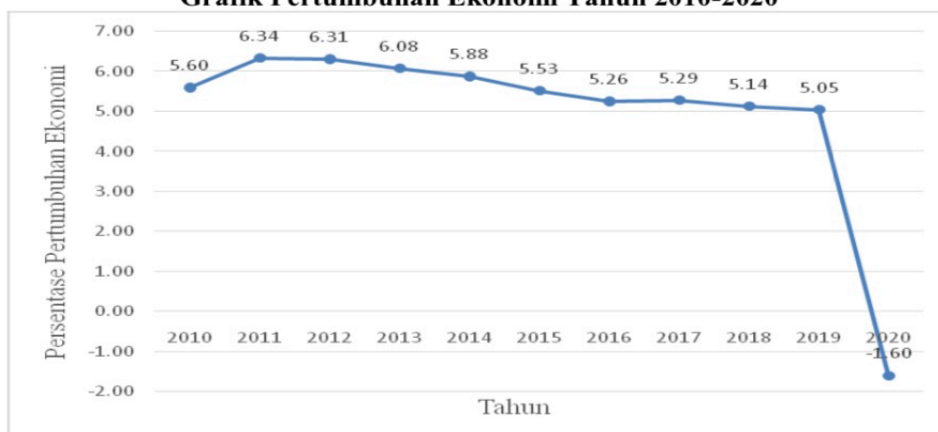
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020(data diolah)

Pada gambar 1.1 terlihat jelas Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi

Sumatera Barat mengalami fluktuasi, dimana indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 70.73 dari tahun sebelumnya sebesar 69.98. pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 71,24 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 72,39. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 72,38. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin atau lebih rendah sebesar 0,01 persen dibandingkan tahun 2019 dikarenakan wabah COVID-19. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah untuk meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi daerah dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu daerah atau negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan sebagai sebuah proses perubahan kondisi ekonomi sebuah negara terus bergerak menuju kondisi yang lebih baik (todaro&smith,2011). Dikatakan bahwa ekonomi sedang berubah Pembangunan yang tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada tingkat pembangunan Prestasi yang dibuat di periode sebelumnya. Menurut Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda yaitu pertumbuhan Perekonomian adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan output per kapita panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikatornya perkembangan yang sukses. Karena itu pertumbuhannya lebih tinggi Ekonomi biasanya membawa kesejahteraan sosial yang lebih tinggi, walaupun ada Indikator lainnya adalah distribusi pendapatan. Dibawah ini disajikan grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera barat sebagai acuan.

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020 (data diolah)

Berdasarkan dari BPS PDRB di provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2010-2012 sempat meningkat dari 5,6 hingga 6,31. Selanjutnya menurun pada tahun 2013 hingga tahun 2019 dari 6,08 hingga 5,05. Dan pada tahun 2020 cenderung menurun menjadi -1.60, hal ini disebabkan pada saat terjadi pandemic covid-19. Berdasarkan historis data laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat 2010-2020 hanya 5,02 persen rata-rata per tahun. Dari data tersebut terbukti laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat negatif. Apa artinya pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat tersebut? Secara umum dapat dinyatakan bahwa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi utama yang tersedia saat ini tidak lagi mampu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang tinggi.

Selain pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya yang berhubungan dengan proses pembangunan manusia. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya terhadap pekerjaan oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai

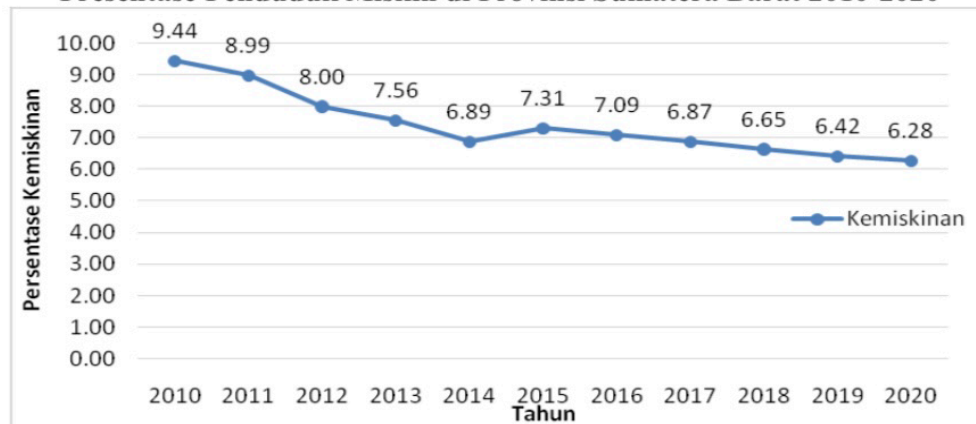
indeks pembangunan manusia. Karena pada dasarnya penduduk yang besar namun dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang sangat berpotensi memberikan beban dalam pembangunan daerah itu sendiri. Pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza,2012).

Usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam pengentasan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal, masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yaitu masih tingginya jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan jumlah penduduk miskin.

Berikut disajikan data presentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat sebagai variabel untuk penelitian :

Gambar 1.3
Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat 2010-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020(data diolah)

Dapat diketahui presentase di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2019 menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2010 presentase penduduk miskin 9,44% dan turun pada tahun 2014 menjadi 6,89%. Namun pada tahun 2015 presentase penduduk miskin sempat naik sebesar 7,31% karena kenaikan perubahan jumlah dan presentase penduduk miskin tersebut tidak lepas dari perubahan nilai garis kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penurunan kemiskinan turun kembali sebesar 6,42% pada tahun 2019 yaitu di daerah pedesaan. Kemudian pada tahun 2020 turun kembali menjadi 6.28%

Tinggi rendahnya nilai IPM yang dicapai oleh setiap negara atau daerah tentu tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya dalam kebijakan fiscal yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan. Dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) ke berbagai sektor untuk mendukung perkembangan indeks pembangunan manusia yang

direalisasikan dengan belanja daerah salah satunya adalah pada sektor pendidikan yang merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang layak dan berharga. Menurut (Meier dan Rauch,2017) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan. Menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Berdasarkan data resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi Sektor Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)	Perubahan (%)
2010	Rp. 192.884.060.888,24	
2011	Rp.115.961.180.327,46	-39.89
2012	Rp 126.478.535.729,19	299.48
2013	Rp. 505.268.039.532,77	-75.8
2014	Rp. 122.249.065.874,62	692.99
2015	Rp. 969.452.965.298,53	-80.86
2016	Rp. 185.570.273,379.00	19.55
2017	Rp. 3.761.712.446,007	95.07
2018	Rp. 712,017,690,042.00	70.13
2019	Rp. 2.383.684.581,894	-95.22
2020	Rp. 123.775.290,851	

Sumber : DPJK Kemenkeu 2020(data diolah)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran pemerintahan untuk sektor pendidikan mulai tahun 2015 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang sangat

signifikan pada jumlah anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dari Rp 3.761.712.446,007. Selanjutnya, jumlah anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan Covid-19 yaitu Rp.123.775.290,851.

Pada bidang pendidikan, tentunya mengacu pada tabel diatas masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan sehingga angka buta huruf dapat ditekan. Pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan adalah wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ketingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya pendidikan memungkinkan terciptanya ide-ide untuk produk, layanan, teknologi yang baru menghasilkan sumber daya manusia yang unggul berkualitas (Rangongo&ngwakwe,2019)

Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat tersebut mendapatkan akses dan bagaimana sarana prasarana sektor kesehatan di daerah tersebut. Menurut Tjiptoherijianto (1989) bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah diteliti oleh Javar, Abbasian dan Sahar (2002) bahwa terdapat korelasi

positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap IPM.

Akses dan sarana prasarana kesehatan dapat dilihat dari bagaimana kepedulian pemerintah terhadap sektor kesehatan tersebut melalui data belanja pemerintah pada sektor kesehatan (Salsabila, 2019). di provinsi Sumatera Barat pemerintah mengalokasikan dana untuk bagian sektor kesehatan yang dimana merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan inti dari kesejahteraan kesehatan tersebut mendasar untuk membentuk kemampuan manusia. Berikut merupakan jumlah anggaran pemerintah untuk kesehatan di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Realisasi Anggaran Kesehatan (Rp)	Perubahan(%)
2010	Rp. 192.838.848.654,76	
2011	Rp. 230.491.345.186,32	19.53
2012	Rp. 306.393.221.558,25	32.94
2013	Rp. 236.261.181.180,14	-22.89
2014	Rp. 437.727.158.950,48	85.28
2015	Rp. 456.171.335.600,02	4.21
2016	Rp. 689.642.872.980,00	51.19
2017	Rp. 932.338.127.263,00	35.2
2018	Rp. 647,856,185,930.00	-30.52
2019	Rp. 836.606.685.638,00	29.14
2020	Rp. 877.334.325.623,00	

Sumber : DPJK Kemenkeu 2020(data diolah)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran pemerintahan untuk sektor kesehatan mulai dari tahun 2010 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah anggaran pemerintah untuk sektor ini mengalami peningkatan drastis dari Rp 932.338.127.263,00. Selanjutnya, jumlah anggaran pada tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya mencapai angka Rp

647.856.185.930,00. Sementara itu, pada tahun 2019 anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan naik hingga tahun 2020 secara signifikan dari Rp. 836.606.685.638,00 menjadi Rp. 877.334.325.623,00.

Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor kesehatan. Pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan IPM dengan mengalokasikan dana pemerintah secara strategis. Pengeluaran pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan daerah adalah dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. APBD di suatu daerah member ringkasan alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendukung indeks pembangunan manusia (Maria,2021). Berdasarkan uraian di atas, menarik diteliti mengenai **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat?
4. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dilihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah disektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dilihat dari indeks pendidikan di Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dilihat dari indeks

harapan hidup di Sumatera Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.
2. Bagi pemerintah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta Padang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini terdapat beberapa bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yaitu menjelaskan tentang kerangka teori yang berkaitan

dengan judul penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yaitu menjelaskan sebuah metodologi penelitian, dan data sumber penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum dari wilayah yang dilakukan sebagai tempat penelitian serta menjelaskan variabel apasaja yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil tersebut berupa hasil olahan data dan hasil dari uji yang telah dilakukan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan setelah melakukan sebuah penelitian.